

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kabupaten Pasaman
Perspektif Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan belum optimal hal ini dikarenakan belum sesuai dengan perlindungan hutan yang di amanatkan didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Kerusakan hutan di Kabupaten Pasaman tepatnya di Kecamatan Pati masih banyak terjadi. Contohnya saja penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk kepentingan pribadi, banyaknya sampak rumah yang sengaja dibuang kedalam hutan oleh masyarakat dan yang lainnya. Sehingga dengan hal demikian dapat mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan bencana alam seperti banjir. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mengatakan bahwa Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, namun kerusakan hutan masih banyak terjadi. Kurangnya pengawasan dari Dinas terkait menjadi faktor kerusakan hutan dapat terjadi, tidak hanya itu kurangnya partisipasi dari masyarakat juga mengakibatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kabupaten Pasaman Perspektif Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan belum optimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat, seperti :
Kurangnya anggaran, Kurangnya Petugas serta Kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar pelaksanaan perlindungan hutan dapat berjalan optimal maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Perlindungan hutan maka Pihak Dinas maupun instansi terkait harus bekerjasama dengan masyarakat untuk melindungi hutan.
2. Pemerintah seharusnya memfasilitasi masyarakat untuk membentuk suatu lembaga masyarakat yang nantinya ditujukan untuk pengawasan terhadap perlindungan hutan.
3. Pemerintah harus lebih tegas mengenai sanksi yang dikenakan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi mengakibatkan kerusakan hutan.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hutan dan dampak yang akan terjadi jika hutan mengalami kerusakan.